

# **RAPAT KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNG RI**

TEMA

**MENINGKATKAN PERAN PENGADILAN  
TINGKAT BANDING SEBAGAI KAWAL  
DEPAN MAHKAMAH AGUNG RI**

**DR. H. AHMAD KAMIL, SH., M.Hum**

**Wakil Ketua Mahkamah Agung RI**

**Bidang Non Yudisial**

**DISAMPAIKAN PADA RAKERNAS  
MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN JAJARAN  
PARA PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG, HAKIM AGUNG  
HAKIM AGUNG *AD HAC*, PEJABAT ESELON I, II MA, PIMPINAN DAN  
PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN  
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA SELURUH INDONESIA**

- **WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG BIDANG NONYUDISIAL MEMBAWAHI KETUA MUDA PEMBINAAN DAN KETUA MUDA PENGAWASAN (PASAL 5, AYAT (5) UU.NO.5/2004)**
  
- **WEWENANG MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA DI BIDANG NONYUDISIAL, MELIPUTI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP:**
  1. ORGANISASI;
  2. ADMINISTRASI, DAN
  3. FINANSIAL**(PASAL 21 UU.48/2009)**
  
- **RUANG LINGKUP BIDANG NON YUDISIAL:**
  - PEMBARUAN PERADILAN
  - PENGAWASAN
  - PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN.
  - PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
  - AKSES PUBLIK ATAS INFORMASI DAN DUKUNGAN INFORMASI
  - ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

# PENGAWASAN

- **DALAM KONTEKS AKUNTABILITAS KINERJA, DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK . BIDANG PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN No.076/KMA/SK/VI/2009, TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERADILAN, YANG MENGATUR: TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENANGANAN PENGADUAN, TERJAMINNYA HAK-HAK PELAPOR/TERLAPOR, BATASAN WAKTU PENYELESAIAN, DAN KEMUDAHAN DALAM MENYAMPAIKAN PENGADUAN.**
- **DAMPAK DARI DIBERLAKUKANNYA SISTEM TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENANGANAN PENGADUAN, MENUNJUKKAN TREN PENINGKATAN PENGADUAN MASYARAKAT YANG DAPAT DILIHAT DARI TAHUN KE TAHUN DALAM KURUN WAKTU 5 TAHUN TERAKHIR SEBAGAI BERIKUT:**

## PERKEMBANGAN JUMLAH PENGADUAN

**Sumber data, diambil dari laporan tahunan 2006-2010**

NO	TAHUN	JUMLAH PENGADUAN
1	2006	505
2	2007	532
3	2008	1919
4	2009	2140
5	2010	2204

## TREN PERKEMBANGAN JUMLAH HUKUMAN YANG DIJATUHKAN

Sumber data diambil dari laporan tahunan 2006-2010

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2006	51
2	2007	44
3	2008	90
4	2009	180
5	2010	228

- DATA TERSEBUT MENUNJUKKAN TREN PENINGKATAN JUMLAH PENGADUAN DAN JUMLAH KORBAN YANG TERKENA SANKSI HUKUMAN BAIK DARI KALANGAN HAKIM MAUPUN NON-HAKIM.
- LANGKAH KE DEPAN PERLU DITINGKATKAN JUMLAH HAKIM PENGAWAS PADA MAHKAMAH AGUNG.

- JUGA MENINGKATKAN JUMLAH HAKIM TINGGI YANG DIDIDIK SEBAGAI AUDITOR YANG DIHARAPKAN DAPAT MENJALANKAN TUGAS-TUGAS PEMERIKSAAN DI DAERAH, DALAM SEMANGAT “MENJADIKAN PENGADILAN TINGKAT BANDING SEBAGAI KAWAL DEPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG DI DAERAH”.
- MANFAATNYA, RENTANG WAKTU DAN JARAK PELAYANAN YANG PANJANG DAN JAUH DAPAT DIPOTONG; JUGA DAPAT MENGHEMAT ANGGARAN.
- DIHARAPKAN AKAN MENGHASILKAN KINERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN YANG LEBIH EFEKTIF DAN EFESIEN.

**LANJUTAN LITBANG, DIKLAT, KUMDIL**  
**Tahun 2010, jumlah Hakim Karier yang**  
**mengikuti pelatihan sertifikasi Hakim Tipikor,**  
**sebanyak 238 orang.**

PENGADILAN	HAKIM KARIER	HAKIM AD HOC	JUMLAH
TINGKAT KASASI	-	4	4
TINGKAT BANDING	30	30	60
TINGKAT PERTAMA	100	74	174
JUMLAH	130	108	238

**SERTIFIKASI PELATIHAN HAKIM  
SEJAK TAHUN 2007-2010**

PENGADILAN	2007	2008	2009	2010	JUMLAH
TINGKAT BANDING	27	85	31	60	269
TINGKAT PERTAMA	73	375	259	178	822
JUMLAH	100	460	290	238	1091

# AKREDITASI DIKLAT

- PADA TANGGAL 3 AGUSTUS 2010, BADAN LITBANG, DIKLAT, KUMDIL TELAH DINYATAKAN SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH YANG TERAKREDITASI UNTUK MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.
- PRAJABATAN GOLONGAN I DAN II DENGAN KATAGORI AKREDITASI B;
- PRAJABATAN GOLONGAN III, AKREDITASI B.
- KEPEMIMPINAN TINGKAT IV, AKREDITASI C.
- KEPEMIMPINAN TINGKAT III, AKREDITASI C.
- DASARNYA, SURAT KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NO.777/1/9/2010, TANGGAL 3 AGUSTUS 2010.

## **GAMBARAN JUMLAH REKRUTMEN SDM PERADILAN 2006-2010**

**Sumber data, dari laporan tahunan tahun 2006-2010**

<b>TAHUN</b>	<b>CAKIM</b>	<b>PNS</b>	<b>JUMLAH</b>
2006	500	113	613
2007	200	323	523
2008	257	1560	1817
2009	200	1501	1701
2010	205	1178	1383

**PERBANDINGAN TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI MA  
dan  
EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN**

Sumber data dari laporan tahunan 2010.

PENDIDIKAN	MAHKAMAH AGUNG	PENGADILAN TINGKAT BANDING	PENGADILAN TINGKAT PERTAMA	JUMLAH
S-3	26	24	16	49
S-2	243	625	1.299	2.167
S-1	765	3.320	15.830	19.915
D-III	41	333	1.025	1.399
SMU	530	1.652	10.025	12.207
SMP	28	16	117	161
SD	48	4	32	84

**KOMPOSISI PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG  
BERDASARKAN JENIS KELAMIN (NOPEMBER 2010)**

Sumber data, diambil dari laporan tahunan 2010

JENIS KELAMIN	MAHKAMA HAGUNG	TINGKAT BANDING	TINGKAT PERTAMA	JUMLAH
LAKI-LAKI	1.091	4.322	18.887	24.300
PEREMPUAN	514	2.672	8.502	11.688

## JUMLAH HAKIM DI EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Data dari laporan tahunan 2010

JENIS KELAMIN	PERADILAN UMUM	PERADILAN AGAMA	PERADILAN MILITER	PERADILAN TUN
WANITA	931	830	16	92
LAKI-LAKI	2.929	2.843	89	244
JUMLAH	3.857	3673	105	336

**ALOKASI ANGGARAN  
PUSAT DAN DAERAH  
PADA 4 (EMPAT) LINGKUNGAN  
PERADILAN**

**TAHUN ANGGARAN 2007 S.D 2011**

## **Pengadaan Tanah Gedung Kantor dan Rumah Dinas thn 2007 s/d 2011**

- **Gedung kantor (2007)**
- Peradilan Umum : 7 satker
- Peradilan Agama : 65 satker
- Peradilan Militer : 4 satker
- Peradilan TUN : 0 satker
  
- **Gedung kantor (2008)**
- Peradilan Umum : 9 satker
- Peradilan Agama : 28 satker
- Peradilan Militer : - satker
- Peradilan TUN : 1 satker
  
- **Rumah Dinas (2007)**
- Peradilan Umum : -
- Peradilan Agama : -
- Peradilan Militer : -
- Peradilan TUN : -
  
- **Rumah Dinas (2008)**
- Peradilan Umum : -
- Peradilan Agama : 10 satker
- Peradilan Militer : -
- Peradilan TUN : -

## Lanjutan

- **Gedung kantor (2009)**

- Peradilan Umum : 4 satker
- Peradilan Agama : 6 satker
- Peradilan Militer : - satker
- Peradilan TUN : - satker

- **Gedung kantor (2010)**

- Peradilan Umum : 3 satker
- Peradilan Agama : 7 satker
- Peradilan Militer : - satker
- Peradilan TUN : 1 satker

- **Gedung kantor (2011)**

- Peradilan Umum : 27 satker
- Peradilan Agama : 22 satker
- Peradilan Militer : 1 satker
- Peradilan TUN : - satker

**Total : 185 satker**

- **Rumah Dinas (2009)**

- Peradilan Umum : 4 satker
- Peradilan Agama : 9 satker
- Peradilan Militer : -
- Peradilan TUN : -

- **Rumah Dinas (2010)**

- Peradilan Umum : -
- Peradilan Agama : -
- Peradilan Militer : -
- Peradilan TUN : -

- **Rumah Dinas (2011)**

- Peradilan Umum : 1 satker
- Peradilan Agama : 4 satker
- Peradilan Militer : -
- Peradilan TUN : -

**Total : 28 satker**

## **Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Tahun 2007 s/d 2011**

- **Gedung kantor (2007)**
  - Peradilan Umum : 25 satker
  - Peradilan Agama : 81 satker
  - Peradilan Militer : 3 satker
  - Peradilan TUN : 1 satker
- **Gedung kantor (2008)**
  - Peradilan Umum : 7 satker
  - Peradilan Agama : 30 satker
  - Peradilan Militer : 7 satker
  - Peradilan TUN : 1 satker
- **Rumah Dinas (2007)**
  - Peradilan Umum : 30 satker
  - Peradilan Agama : 34 satker
  - Peradilan Militer : -
  - Peradilan TUN : -
- **Rumah Dinas (2008)**
  - Peradilan Umum : 39 satker
  - Peradilan Agama : 39 satker
  - Peradilan Militer : -
  - Peradilan TUN : 5 satker

## Lanjutan

- **Gedung kantor (2009)**
  - Peradilan Umum : 49 satker
  - Peradilan Agama : 79 satker
  - Peradilan Militer : 8 satker
  - Peradilan TUN : 4 satker
  
- **Gedung kantor (2010)**
  - Peradilan Umum : 40 satker
  - Peradilan Agama : 43 satker
  - Peradilan Militer : 9 satker
  - Peradilan TUN : 5 satker
  
- **Gedung kantor (2011)**
  - Peradilan Umum : 84 satker
  - Peradilan Agama : 67 satker
  - Peradilan Militer : 8 satker
  - Peradilan TUN : 2 satker
  - Total : 553 satker**
  
- **Rumah Dinas (2009)**
  - Peradilan Umum : 43 satker
  - Peradilan Agama : 23 satker
  - Peradilan Militer : -
  - Peradilan TUN : 2 satker
  
- **Rumah Dinas (2010)**
  - Peradilan Umum : 6 satker
  - Peradilan Agama: 5 satker
  - Peradilan Militer : -
  - Peradilan TUN : -
  
- **Rumah Dinas (2011)**
  - Peradilan Umum : 4 satker
  - Peradilan Agama : 28 satker
  - Peradilan Militer : 2 satker
  - Peradilan TUN : 2 satker
  - Total : 262 satker**

## **Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Dinas tahun 2007 s/d 2011**

- **Gedung kantor (2007)**
  - Peradilan Umum : 101 satker
  - Peradilan Agama : 19 satker
  - Peradilan Militer : 2 satker
  - Peradilan TUN : 3 satker
  
- **Gedung kantor (2008)**
  - Peradilan Umum : 107 satker
  - Peradilan Agama : 38 satker
  - Peradilan Militer : -
  - Peradilan TUN : 7 satker
  
- **Rumah Dinas (2007)**
  - Peradilan Umum : 160 satker
  - Peradilan Agama : 5 satker
  - Peradilan Militer : -
  - Peradilan TUN : 10 satker
  
- **Rumah Dinas (2008)**
  - Peradilan Umum : 114 satker
  - Peradilan Agama : 14 satker
  - Peradilan Militer : -
  - Peradilan TUN : 6 satker

## Lanjutan

- **Gedung kantor (2009)**
- Peradilan Umum : 53 satker
- Peradilan Agama : 11 satker
- Peradilan Militer : -
- Peradilan TUN : 3 satker

- **Gedung kantor (2010)**
- Peradilan Umum : 58 satker
- Peradilan Agama : 22 satker
- Peradilan Militer : -
- Peradilan TUN : 5 satker

- **Gedung kantor (2011)**
- Peradilan Umum : 105 satker
- Peradilan Agama : 53 satker
- Peradilan Militer : -
- Peradilan TUN : 13 satker
- Total : 600 satker**

- **Rumah Dinas (2009)**
- Peradilan Umum : 75 satker
- Peradilan Agama : 4 satker
- Peradilan Militer : -
- Peradilan TUN : 1 satker

- **Rumah Dinas (2010)**
- Peradilan Umum : 28 satker
- Peradilan Agama : 10 satker
- Peradilan Militer : -
- Peradilan TUN : 1 satker

- **Rumah Dinas (2011)**
- Peradilan Umum : 26 satker
- Peradilan Agama : 12 satker
- Peradilan Militer : -
- Peradilan TUN : -
- Total : 466 satker**

## Alokasi Anggaran Mahkamah Agung RI Pusat dan Daerah pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Tahun 2007

No	Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah (4 Lingkungan)	Tahun 2007 Pagu Anggaran Rp.3.091.726.309.000,-	(%)
I	Pusat	Rp 663.679.702.000,-	21,47%
II	Daerah	Rp 2.428.046.607.000,-	
1	Peradilan Umum	Rp 1.355.389.289.000,-	43,84 %
2	Peradilan Agama	Rp 941.712.832.000,-	30,46 %
3	Peradilan TUN	Rp 84.742.886.000,-	2,74 %
4	Peradilan Militer	Rp 46.201.600.000,-	1,49 %
	Total	Rp 3.091.726.309.000,-	100%

**Alokasi Anggaran Mahkamah Agung RI Pusat  
dan Daerah pada 4 (empat) Lingkungan  
Peradilan Tahun 2008**

<b>No</b>	<b>Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah (4 Lingkungan)</b>	<b>Tahun 2008 Pagu Anggaran Rp.6.454.081.211.000,-</b>	<b>(%)</b>
I	Pusat	Rp 3.818.668.170.000,-	59%
II	Daerah	Rp 2.635.413.041.000,-	
1	Peradilan Umum	Rp 1.450.817.689.000,-	22 %
2	Peradilan Agama	Rp 1.006.195.507.000,-	16 %
3	Peradilan TUN	Rp 110.563.653.000,-	2 %
4	Peradilan Militer	Rp 67.836.192.000,-	1 %
	Total	Rp 6.454.081.211.000,-	100%

**Alokasi Anggaran Mahkamah Agung RI Pusat  
dan Daerah pada 4 (empat) Lingkungan  
Peradilan Tahun 2009**

<b>No</b>	<b>Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah (4 Lingkungan)</b>	<b>Tahun 2009 Pagu Anggaran Rp.5.473.085.231.000,-</b>	<b>(%)</b>
I	Pusat	Rp 2.855.100.749.000,-	52,17%
II	Daerah	Rp 2.617.984.482.000,-	
1	Peradilan Umum	Rp 1.380.372.307.000,-	25,2 %
2	Peradilan Agama	Rp 1.085.666.444.000,-	19,83 %
3	Peradilan TUN	Rp 102.532.863.000,-	1,87 %
4	Peradilan Militer	Rp 49.412.868.000,-	0,90 %
	Total	Rp 5.473.085.231.000,-	100%

**Alokasi Anggaran Mahkamah Agung RI  
Pusat dan Daerah pada 4 (empat)  
Lingkungan Peradilan Tahun 2010**

<b>No</b>	<b>Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah (4 Lingkungan)</b>	<b>Tahun 2010 Pagu Anggaran Rp.5.219.948.230.000,-</b>	<b>(%)</b>
I	Pusat	Rp 2.665.810.315.000,-	51.07%
II	Daerah	Rp 2.554.137.915.000,-	
1	Peradilan Umum	Rp 1.406.606.870.000,-	26,95 %
2	Peradilan Agama	Rp 973.613.249.000,-	18,65 %
3	Peradilan TUN	Rp 113.211.067.000,-	2,17 %
4	Peradilan Militer	Rp 60.706.729.000,-	1,16 %
	Total	Rp 5.219.948.230.000,-	100%

## Alokasi Anggaran Mahkamah Agung RI Pusat dan Daerah pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Tahun 2011

No	Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah (4 Lingkungan)	Tahun 2011 Pagu Anggaran Rp. 6.055.300.000.000,-	(%)
I	Pusat	Rp 2.658.437.534.000,-	43.9%
II	Daerah	Rp 3.396.862.466.000,-	
1	Peradilan Umum	Rp 1.925.055.267.000,-	31,79 %
2	Peradilan Agama	Rp 1.267.057.353.000,-	20,92 %
3	Peradilan TUN	Rp 72.529.618.000,-	1,19 %
4	Peradilan Militer	Rp 132.220.228.000,-	2,18 %
	Total	Rp 6.055.300.000.000,-	100%

**DATA PENGEMBANGAN LEMBAGA  
4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN  
DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG RI**

- **Berdasarkan Keppres No. 3 tahun 2008 tentang pembentukan pengadilan:**
  - PN Balige
  - PN Masamba
  - PN Saumlaki
  - PN Ranai
  - PN Prambumulih
  - PN Pagar Alam
  - PN Kasongan
  - PN Parigi
  - PN Bintuhan
  - PN Tais
  - PN Malili
  - PN Labuan Bajo
  - PN Amurang
  - PN Kepahiang
  - PN Tubei
  - PN Simpang Tiga Radelong
  
- **Berdasarkan Keppres No 20 tahun 2004 tentang pembentukan pengadilan:**
  - PN Oelamasi
  - PN Pasang Kayu
  - PN Andoolo
  - PN Pasar Wajo
  
- **Berdasarkan Keppres No 20 tahun 2004 tentang pembentukan pengadilan:**
  - PN Ngabang
  
- **Berdasarkan Keppres No 15 tahun 2009 tentang pembentukan pengadilan:**
  - Pengadilan Perikanan pada PN Tanjung Pinang
  - Pengadilan Perikanan pada PN Ranai

## Lanjutan

- **Berdasarkan Keppres No 3 tahun 2011 tentang pembentukan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama:**
  - PA Kota Tasikmalaya
  - PA Kota Banjar
  - PA Amurang
  - PA Marisa
  - PA Parigi
  - PA Andoolo
  - PA Pasarwajo
  - Msy Simpang Tiga Radelong
  - PA Kota Padang Sidempuan
  - PA Mentok
  - PA Lebong
  - PA Batu Licin
  - PA Taliwang
  - PA Labuan Bajo
  - PA Nunukan
  - PA Arso
- **Berdasarkan Keppres No 18 tahun 2011 tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara:**
  - PTUN Tanjung Karang
  - PTUN Serang

**BADAN PENGAWASAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Tahun 2007 s.d 31 Agustus 2011**

**Statistik Hukuman Disiplin yang dijatuhkan  
Badan Pengawasan MA RI  
tahun 2007 s/d 2011**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>TOTAL Hukuman</b>
<b>1</b>	<b>Hakim</b>	<b>275</b>
<b>2</b>	<b>Panitera/Sekretaris</b>	<b>49</b>
<b>3</b>	<b>Wakil Panitera</b>	<b>14</b>
<b>4</b>	<b>Wakil Sekretaris</b>	<b>16</b>
<b>5</b>	<b>Panitera Muda</b>	<b>31</b>
<b>6</b>	<b>Pejabat Struktural</b>	<b>16</b>
<b>7</b>	<b>Panitera Pengganti</b>	<b>53</b>
<b>8</b>	<b>Juru Sita/Juru Sita Pengganti</b>	<b>39</b>
<b>9</b>	<b>Pegawai Negeri Sipil</b>	<b>99</b>
<b>10</b>	<b>Calon Hakim</b>	<b>3</b>
<b>11</b>	<b>Calon PNS</b>	<b>4</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>599</b>

## Lanjutan

Tahun	Peradilan Umum		Peradilan Agama	
	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding
2007	324	-	347	-
2008	-	142	-	145
2009	-	96	-	87
2010	88	19	93	9
Total	412	257	440	241

Tahun	Peradilan TUN		Peradilan Militer	
	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Pertama	Tingkat Banding
2007	-	33	-	33
2008	-	30	-	5
2009	-	0	-	0
2010	5	4	6	2
Total	5	67	6	40

**Data Hakim yang telah mengikuti sosialisasi  
pengawasan tahun 2007 s/d 2010**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2007	737
2008	322
2009	183
2010	226
Total	1.468

**TERIMA KASIH  
ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB**